

PENGUATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM KERANGKA DEMOKRASI MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPEKAAN DAN KONTROL SOSIAL TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DI TINGKAT LOKAL

Muhammad Irpan ^{1*}, Rostina ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: dosen02999@unpam.ac.id

ABSTRAK

Dalam kerangka pembangunan demokrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan, keterlibatan warga menjadi fondasi utama bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Namun pada level akar rumput, terutama di kawasan perkotaan seperti Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, partisipasi masyarakat masih bersifat formal dan belum mencerminkan demokrasi yang substantif. Komunitas binaan Yayasan Ashaabul Ardhi Sahabat Bumi (YASBI), yang mayoritas bekerja di sektor informal, menghadapi berbagai keterbatasan sosial-ekonomi yang berdampak pada rendahnya pemahaman mengenai hak-hak kewargaan serta mekanisme pengambilan keputusan publik. Kondisi ini membuat aspirasi warga kerap tidak tersalurkan dengan baik, sementara keterlibatan mereka lebih banyak bersifat pasif dan belum berkembang menjadi partisipasi deliberatif. Minimnya literasi hukum, rendahnya pemahaman demokrasi, serta lemahnya kapasitas advokasi menjadi faktor utama yang menghambat munculnya partisipasi bermakna. Warga sering ditempatkan sebagai penerima program tanpa ruang dialog yang memadai untuk menyampaikan kebutuhan ataupun melakukan pengawasan terhadap kebijakan lokal. Untuk menjawab tantangan tersebut, program Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas komunitas melalui model pemberdayaan yang terstruktur di bawah kemitraan dengan YASBI sebuah lembaga sosial yang berorientasi pada pendidikan, lingkungan, dan pengembangan komunitas. Kegiatan dilaksanakan melalui rangkaian lokakarya literasi hukum dan demokrasi, dialog partisipatif, serta forum interaktif antara warga dan perangkat kelurahan. Pendekatan ini dirancang untuk membangun pemahaman mengenai sistem demokrasi, meningkatkan keterampilan komunikasi publik, dan menumbuhkan keberanian warga dalam menyuarakan kepentingan kolektif. Seluruh proses menggunakan metode partisipatif dan *experiential learning*, sehingga peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi turut berperan sebagai penghasil ide perubahan sosial. Melalui program ini diharapkan lahir komunitas yang memiliki kesadaran kritis terhadap isu-isu publik, terutama dalam aspek sosial dan lingkungan, serta mampu mengembangkan inisiatif bersama untuk memperbaiki kualitas tata kelola di lingkungannya. Luaran yang diharapkan mencakup peningkatan literasi demokrasi, tersusunnya model pelatihan partisipasi publik yang dapat direplikasi, serta terbentuknya forum komunikasi warga sebagai ruang dialog berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat ekosistem demokrasi lokal yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Partisipasi Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Demokrasi

ABSTRACT

Within the framework of equitable and sustainable democratic development, citizen engagement constitutes a fundamental pillar for the realization of responsive and accountable governance. However, at the grassroots level particularly in urban areas such as Rawa Buntu Subdistrict, Serpong District community participation remains largely formalistic and has yet to reflect substantive democracy. The community fostered by the Ashaabul Ardhi Sahabat Bumi Foundation (YASBI), whose members predominantly work in the informal sector, faces various socio-economic constraints that contribute to a limited understanding of citizenship rights and public decision-making mechanisms. As a result, citizens' aspirations are often inadequately articulated, while their involvement tends to remain passive and has not evolved into deliberative participation. Limited

legal literacy, insufficient democratic understanding, and weak advocacy capacity constitute the main barriers to the emergence of meaningful participation. Citizens are frequently positioned merely as program beneficiaries, with minimal opportunities for dialogue to express their needs or to monitor local policies. To address these challenges, this Community Service Program was implemented as an effort to strengthen community capacity through a structured empowerment model in partnership with YASBI, a social organization oriented toward education, environmental issues, and community development. The program was carried out through a series of legal and democratic literacy workshops, participatory dialogues, and interactive forums involving residents and local government officials. This approach was designed to enhance understanding of democratic systems, improve public communication skills, and foster citizens' confidence in articulating collective interests. The entire process employed participatory methods and experiential learning, enabling participants not only to receive information but also to actively contribute ideas for social change. Through this program, it is expected that a community with critical awareness of public issues particularly in social and environmental dimensions will emerge, capable of developing collective initiatives to improve the quality of local governance. The anticipated outcomes include increased democratic literacy, the development of a replicable public participation training model, and the establishment of a community communication forum as a space for sustained dialogue. Thus, this initiative focuses not only on enhancing individual capacity but also on strengthening a collaborative, inclusive, and sustainable local democratic ecosystem.

Keywords : Public Participation, Community Empowerment, Democracy

PENDAHULUAN

Kehidupan demokrasi di Indonesia idealnya menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai subjek partisipatif yang memiliki suara dan akses dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi publik, dalam konteks demokrasi lokal, mencakup kemampuan mengajukan aspirasi, mengontrol pelaksanaan kebijakan, dan berdialog dengan pemerintahan seluruhnya memerlukan kapasitas warga, literasi hukum, dan ruang partisipatif yang efektif. Dalam kerangka pembangunan sosial yang berkeadilan, partisipasi publik menempati posisi strategis sebagai pilar utama penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Demokrasi yang hidup tidak hanya ditandai oleh keberadaan institusi formal seperti pemilu dan lembaga perwakilan rakyat, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam mengontrol, memberi masukan, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Namun, idealisme ini belum sepenuhnya terwujud dalam konteks masyarakat perkotaan di Indonesia, termasuk di wilayah Tangerang Selatan, khususnya di Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, yang menjadi lokasi mitra pengabdian yakni Yayasan Ashaabul Ardhi Sahabat Bumi (YASBI). YASBI merupakan lembaga sosial yang bergerak di bidang pendidikan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan penelusuran literasi digital, YASBI berawal dari inisiatif sosial warga yang peduli terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu di sekitar wilayah Rawa Buntu. Sebelum berbadan hukum, kegiatan mereka berfokus pada pendidikan non-formal bagi anak-anak dari keluarga buruh, pemulung, dan pekerja sektor informal. Dalam perkembangannya, semangat tersebut diinstitusionalisasikan menjadi yayasan yang berorientasi pada pendidikan

formal dan pembinaan karakter, sekaligus menjadi wadah pemberdayaan masyarakat lokal.

Secara sosial, masyarakat binaan YASBI menghadapi tantangan klasik berupa rendahnya literasi hukum, keterbatasan akses informasi publik, dan minimnya pengalaman berpartisipasi dalam forum-forum kebijakan di tingkat kelurahan. Warga cenderung melihat proses pemerintahan sebagai wilayah struktural yang tertutup, sehingga hubungan antara masyarakat dan aparatur pemerintah berlangsung satu arah. Fenomena ini menimbulkan jarak sosial dan menurunkan tingkat kepekaan masyarakat terhadap isu publik yang menyangkut kepentingan mereka sendiri.

Secara geografis, lokasi YASBI berada di Kampung Dadap RT 001 RW 003, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Wilayah ini termasuk kawasan padat penduduk dengan heterogenitas sosial yang tinggi. Sebagian besar warga bekerja di sektor informal, seperti pedagang kecil, buruh bangunan, pekerja harian lepas, dan jasa rumah tangga. Kondisi ini menjadikan YASBI bukan hanya lembaga pendidikan, melainkan juga pusat kegiatan sosial yang berperan penting dalam peningkatan kapasitas warga sekitar.

Dalam beberapa tahun terakhir, YASBI telah mengembangkan sejumlah kegiatan sosial yang meliputi pendidikan dasar anak-anak kurang mampu, program lingkungan berbasis komunitas, serta pelatihan keterampilan sederhana bagi ibu rumah tangga. Namun, hasil pengamatan menunjukkan bahwa meskipun kegiatan ini bernilai sosial tinggi, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam pemahaman warga terhadap konsep partisipasi publik dan nilai-nilai demokrasi. Warga cenderung pasif dalam menyuarakan aspirasi, belum terbiasa berdialog dengan pemerintah kelurahan, dan belum memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam forum-forum publik. Dalam konteks inilah, kegiatan PKM ini diarahkan bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman teoretis warga tentang hak-hak partisipatifnya, tetapi juga untuk menumbuhkan kemampuan praktis dalam melakukan kontrol sosial terhadap kinerja pemerintahan. Literasi hukum dan demokrasi yang diperkenalkan tidak berhenti pada ranah konseptual, melainkan diterapkan melalui pelatihan advokasi warga, simulasi forum musyawarah, serta pembentukan forum komunikasi masyarakat dan pemerintah kelurahan. Dengan pendekatan ini, kegiatan PKM diharapkan mampu menghasilkan peningkatan kepekaan sosial warga terhadap isu publik yang berdampak langsung pada kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, hasil wawancara informal dengan pengurus YASBI menunjukkan adanya minimnya literasi hukum dan kesadaran demokrasi di kalangan masyarakat binaan. Masyarakat masih melihat pengambilan keputusan publik sebagai wilayah struktur kekuasaan formal, bukan sebagai arena dialog yang terbuka bagi warga, sementara mereka hanya sebagai penerima manfaat. Fenomena ini menunjukkan lemahnya internalisasi nilai partisipatif di

tingkat akar rumput sebuah kondisi yang berpotensi melemahkan demokrasi substantif.

Implikasi dari arah kegiatan PKM ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa percaya diri warga dalam menyampaikan aspirasi, memperkuat kesadaran kritis terhadap kebijakan pemerintah, serta melahirkan kelompok masyarakat yang mandiri dalam mengawal isu-isu publik di lingkungannya. Dengan meningkatnya kapasitas literasi hukum, warga akan memahami hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan mampu menggunakan pengetahuan tersebut untuk membangun relasi partisipatif dengan pemerintah lokal. Prinsip partisipasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2004 dan Pasal 4 UU No. 14 Tahun 2008 menegaskan bahwa warga negara memiliki hak untuk terlibat aktif dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Dari perspektif sosial, kondisi ini diperparah oleh terbatasnya akses terhadap informasi publik dan media partisipatif. Belum tersedia wadah komunikasi warga yang terstruktur antara masyarakat dan perangkat kelurahan. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah binaan YASBI masih mengalami keterbatasan dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta belum terlatih dalam mengartikulasikan kebutuhan sosialnya secara konstruktif. Dalam konteks inilah, pemberdayaan masyarakat menjadi instrumen penting untuk menghidupkan kembali partisipasi publik sebagai bagian dari praktik demokrasi sehari-hari.

Lebih jauh, YASBI sebagai mitra non-produktif ekonomi memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak perubahan sosial. Dengan basis komunitas yang kuat dan jejaring sosial yang luas, yayasan ini dapat berperan sebagai *agent of change* dalam membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan. Pengurus YASBI, yang terdiri atas pendidik dan relawan sosial, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap gagasan penguatan literasi hukum dan demokrasi. Namun, mereka juga mengakui perlunya pendampingan akademik dan metodologis agar kegiatan pemberdayaan yang dilakukan lebih sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil jangka panjang.

Kondisi sosial masyarakat sekitar YASBI juga menunjukkan adanya tantangan serius dalam bidang keadilan sosial dan pemerataan akses layanan publik. Sebagian keluarga binaan masih menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, serta peluang partisipasi ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui bantuan sosial, tetapi memerlukan transformasi sosial melalui peningkatan kapasitas dan kesadaran warga sebagai subjek aktif pembangunan. Dengan demikian, analisis situasi ini menegaskan bahwa wilayah mitra memiliki potensi sosial yang kuat, tetapi juga menghadapi kendala mendasar dalam hal partisipasi publik, literasi demokrasi, dan kesadaran hukum warga. Hal ini menjadi dasar pemikiran bagi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

yang berfokus pada penguatan partisipasi publik melalui strategi pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dengan YASBI sebagai mitra utama.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, yang dihadapi masyarakat binaan YASBI, maka penulis mencoba merumuskan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana meningkatkan literasi hukum dan demokrasi masyarakat binaan YASBI agar mampu berpartisipasi secara aktif dan substantif dalam proses kebijakan publik?
2. Bagaimana menyediakan ruang dialog yang efektif antara masyarakat dan pemerintah kelurahan guna menyalurkan aspirasi serta mendorong transparansi dan akuntabilitas di tingkat lokal?
3. Bagaimana memperkuat kapasitas organisasi YASBI serta memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi dan teknologi partisipatif agar pemberdayaan komunitas dapat berjalan secara berkelanjutan?

Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini merupakan wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian yang bertujuan untuk menghadirkan kontribusi ilmiah dan praktis kepada masyarakat luas. Secara umum, tujuan dari pelaksanaan PKM ini adalah memberikan edukasi dan pemberdayaan kepada masyarakat, khususnya masyarakat binaan YASBI, dalam rangka meningkatkan kesadaran politik dan mampu menumbuhkan rasa percaya diri warga dalam menyampaikan aspirasi, memperkuat kesadaran kritis terhadap kebijakan pemerintah, serta melahirkan kelompok masyarakat yang mandiri dalam mengawal isu-isu publik di lingkungannya.

Dengan meningkatnya kapasitas literasi hukum, warga akan memahami hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Namun demikian, secara khusus tujuan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan literasi hukum dan demokrasi masyarakat binaan YASBI agar warga memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak konstitusional serta mampu berpartisipasi secara aktif dan substantif dalam proses kebijakan publik di tingkat lokal.
2. Menyediakan dan memperkuat ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah kelurahan sebagai sarana penyampaian aspirasi, musyawarah publik, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program

- pembangunan.
3. Memperkuat kapasitas organisasi YASBI dan mendorong pemanfaatan teknologi partisipatif sehingga proses pemberdayaan komunitas dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat.
 4. Menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial di kalangan Masyarakat mengenai pentingnya partisipasi publik dalam kehidupan berdemokrasi
 5. Meningkatkan rasa percaya diri, motivasi positif, dan semangat kemandirian pada kelompok Masyarakat dalam menyampaikan ide dan gagasan nya untuk Pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, kegiatan pengabdian ini tidak hanya dimaksudkan sebagai intervensi sesaat atau sekadar bentuk bantuan insidental semata. Lebih dari itu, kegiatan ini dirancang sebagai sebuah proses pembelajaran yang berkelanjutan, yang menempatkan Masyarakat sebagai subjek aktif dalam pembangunan. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini mendorong transformasi pola pikir, peningkatan kapasitas, serta pembentukan jejaring sosial yang memungkinkan masyarakat untuk terus berkembang secara mandiri. Harapannya, dampak dari program ini tidak berhenti pada berakhirnya kegiatan, tetapi justru menjadi pemantik perubahan jangka panjang yang mengarah pada kemandirian ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan hukum masyarakat secara menyeluruh.

Manfaat Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang luas, baik bagi masyarakat binaan, mitra organisasi, pemerintah kelurahan, maupun bagi institusi perguruan tinggi. Bagi masyarakat binaan YASBI, kegiatan ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak konstitusional, literasi hukum, serta prinsip dasar demokrasi yang selama ini belum banyak mereka akses. Melalui proses pendampingan yang interaktif, warga memperoleh ruang belajar untuk memahami perannya dalam proses pengambilan kebijakan publik, termasuk bagaimana menyampaikan aspirasi secara efektif, melakukan pengawasan sosial, dan berpartisipasi dalam forum-forum musyawarah. Peningkatan kapasitas ini diharapkan menumbuhkan sikap percaya diri dan keberanian warga untuk terlibat aktif dalam kehidupan demokrasi di tingkat lokal, sehingga partisipasi mereka tidak lagi bersifat formalitas, tetapi menjadi partisipasi yang substantif dan berdaya.

Bagi YASBI sebagai mitra, kegiatan PKM ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan relawan dalam mengelola program pemberdayaan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Selama ini, sebagian program YASBI masih bersifat karitatif atau berbasis bantuan sesaat. Melalui PKM ini,

YASBI mendapatkan wawasan baru mengenai strategi pendampingan berbasis partisipasi, metode pelatihan demokrasi, serta pendekatan komunikasi komunitas yang memungkinkan terciptanya perubahan sosial yang lebih struktural. Selain itu, YASBI juga memperoleh model kurikulum dan modul literasi demokrasi yang dapat digunakan untuk kegiatan internal mereka di masa mendatang, sehingga penguatan kapasitas ini memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Manfaat lainnya dirasakan oleh pemerintah kelurahan sebagai pemangku kepentingan lokal. Kehadiran PKM ini membantu menciptakan ruang dialog antara warga dan pemerintah kelurahan yang sebelumnya belum terfasilitasi dengan baik. Forum komunikasi yang terbentuk melalui kegiatan ini dapat menjadi sarana strategis bagi kelurahan untuk menerima aspirasi masyarakat secara lebih terstruktur dan akuntabel.

Pada saat yang sama, peningkatan kualitas partisipasi warga juga membantu pemerintah dalam merumuskan program pembangunan berbasis kebutuhan nyata masyarakat (*bottom-up approach*), sehingga proses perumusan kebijakan di tingkat kelurahan menjadi lebih responsif dan tepat sasaran.

Bagi Universitas Pamulang, kegiatan ini memberikan kontribusi besar terhadap implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, dosen dapat menerapkan keahlian akademik mereka pada konteks sosial yang nyata, memperkuat relevansi ilmu hukum dalam pemberdayaan masyarakat, dan membangun hubungan kolaboratif antara universitas dan komunitas. Selain itu, kegiatan ini juga berpotensi menghasilkan luaran akademik seperti publikasi, laporan pengabdian, atau model pelatihan yang dapat digunakan untuk penelitian atau PKM berikutnya.

Secara akademik dan ilmiah, PKM ini menghasilkan berbagai luaran yang dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian mengenai literasi hukum, demokrasi lokal, dan pemberdayaan masyarakat. Model pelatihan, modul pendidikan, serta temuan-temuan lapangan dari kegiatan ini dapat direplikasi di wilayah urban lain yang memiliki karakteristik serupa, sehingga manfaat PKM tidak berhenti pada lingkup YASBI saja, tetapi dapat memberikan dampak pengetahuan yang lebih luas.

Secara keseluruhan, PKM ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem demokrasi lokal yang berbasis kolaborasi, dialog, dan kesadaran kritis warga. Melalui peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan organisasi lokal, serta terbentuknya ruang komunikasi publik, kegiatan ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan sosial di tingkat komunitas.

Tinjauan Pustaka

1. Partisipasi Publik dalam Demokrasi Lokal

Partisipasi publik merupakan salah satu indikator utama berjalannya prinsip kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Menurut Jimly Asshiddiqie (2012), partisipasi publik adalah mekanisme di mana warga dapat terlibat secara aktif dalam pembentukan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik, baik melalui kanal formal maupun informal. Dalam konteks pemerintahan lokal, partisipasi tidak hanya mencakup kehadiran warga dalam forum musyawarah, tetapi juga keterlibatan mereka dalam menyuarakan aspirasi, mengawasi jalannya pemerintahan, dan terlibat dalam produksi gagasan publik.

Arnstein (1969) melalui *Ladder of Citizen Participation* menjelaskan bahwa partisipasi memiliki tingkatan, mulai dari partisipasi manipulatif hingga partisipasi penuh di mana warga mempunyai kendali dalam proses pengambilan keputusan. Model ini sangat relevan untuk memahami kondisi partisipasi masyarakat urban seperti di Kelurahan Rawa Buntu, di mana partisipasi warga sering berada pada level simbolik—sekadar diundang dalam forum tanpa kontribusi substansial. Penelitian Indonesia lima tahun terakhir memperkuat hal tersebut. Studi *Transparansi Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU IKN* (JAH, 2024) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan sering bersifat formalitas saja. Demikian pula Noor dan Nuryanti (2023) dalam *Indonesian Perspectives on Democracy* menegaskan bahwa budaya deliberasi publik masih lemah, terutama di lingkungan perkotaan dengan tingkat literasi hukum rendah. Dengan demikian, peningkatan kualitas partisipasi publik menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

2. Literasi Hukum dan Kesadaran Hak Warga Negara

Literasi hukum (legal literacy) merupakan kemampuan memahami prinsip, hak, prosedur, serta instrumen hukum untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Satjipto Rahardjo (2009), hukum harus dipahami bukan sekadar teks normatif, tetapi sebagai alat untuk menghadirkan keadilan substantif, terutama bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki literasi hukum memadai akan mampu membedakan antara kebijakan yang adil dan yang merugikan, serta dapat menggunakan kanal hukum untuk melindungi kepentingannya.

Literasi hukum juga dikaitkan dengan *konstitusional awareness*. Hendrianto (2022) menegaskan bahwa supremasi hukum hanya bisa ditegakkan bila warga memahami hak konstitusionalnya, seperti hak berpendapat, hak atas informasi, dan hak berpartisipasi dalam urusan publik. Rendahnya literasi hukum membuat warga enggan menyampaikan aspirasi, takut kepada otoritas, atau pasif dalam proses kebijakan. Fenomena ini juga terlihat pada masyarakat binaan YASBI yang sebagian besar bekerja di sektor informal dan memiliki keterbatasan akses pendidikan. Penelitian *JPM* (2023) menunjukkan bahwa program literasi hukum berbasis komunitas dapat meningkatkan keberanian warga dalam melapor,

berdialog, dan terlibat dalam musyawarah publik. Dengan demikian, peningkatan literasi hukum menjadi pilar utama PKM ini, karena tanpa pemahaman hukum yang memadai, partisipasi masyarakat akan tetap berada pada tingkat formalistik.

3. Pemberdayaan Masyarakat Urban dan Transformasi Sosial

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) adalah proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok agar dapat mengambil keputusan secara mandiri dan mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan mereka. Menurut Paulo Freire (1970) dalam *Pedagogy of the Oppressed*, pemberdayaan harus dimulai dengan pembangkitan *kesadaran kritis* (critical consciousness) melalui dialog dan refleksi. Artinya, masyarakat tidak hanya diberikan informasi, tetapi diajak membaca persoalan hidupnya dan mampu menyusun strategi perubahan.

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2012), pemberdayaan yang efektif mencakup tiga dimensi: kapasitas personal, sosial, dan struktural. Pada masyarakat urban marginal, pemberdayaan harus mencakup penguatan literasi, keterampilan berbicara dalam forum publik, kepercayaan diri, hingga kemampuan membangun jejaring sosial. Penelitian terbaru *Community Organization-Based Literacy Empowerment* (Sari, 2023) menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis komunitas efektif meningkatkan kemampuan warga mengakses informasi publik, berkomunikasi dengan pemerintah, serta terlibat dalam kegiatan sosial. Pendekatan ini relevan dengan PKM YASBI yang menggunakan lokakarya interaktif, dialog dua arah, dan simulasi penyampaian aspirasi sebagai strategi peningkatan kapasitas warga. Dengan demikian, pemberdayaan dalam konteks ini dipahami bukan sebagai “pemberian”, tetapi sebagai proses membangkitkan kapasitas internal masyarakat agar mampu menjadi aktor perubahan sosial di lingkungannya.

4. Demokrasi Deliberatif dan Ruang Dialog Publik

Demokrasi deliberatif merupakan pendekatan demokrasi yang menempatkan dialog, pertukaran alasan, dan musyawarah sebagai inti dari proses pengambilan keputusan publik. Habermas (1984) menyatakan bahwa kualitas keputusan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas ruang publik, yaitu ruang yang bebas dari dominasi dan memungkinkan warga berdialog secara setara.

Dalam konteks Indonesia, Baan (2025) menyebut bahwa demokrasi deliberatif masih menghadapi keterbatasan, terutama di tingkat lokal, karena minimnya ruang musyawarah yang inklusif. Jurnal *Dinamika Legislasi Indonesia dalam Demokrasi Deliberatif* (2025) menunjukkan bahwa kultur musyawarah yang rasional dan terbuka belum terinternalisasi dalam banyak komunitas, terutama komunitas urban dengan tingkat literasi rendah. Kondisi tersebut serupa dengan masyarakat binaan YASBI, yang meski memiliki keinginan untuk berpartisipasi, sering tidak memiliki ruang aman untuk menyampaikan pendapat. Karena itu, PKM

ini menghadirkan forum interaktif antara warga dan perangkat kelurahan sebagai sarana untuk mempraktikkan demokrasi deliberatif dalam skala kecil.

METODE

1. Kerangka Pemecah Masalah

Kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan mitra yang menunjukkan tiga persoalan utama, yaitu rendahnya literasi hukum dan demokrasi, terbatasnya ruang dialog publik, serta lemahnya kapasitas organisasi komunitas.

Untuk menjawab persoalan tersebut, digunakan pendekatan integratif yang menggabungkan teori partisipasi, teori pemberdayaan, dan model demokrasi deliberatif sebagai dasar konseptual dalam merancang intervensi yang bersifat transformatif dan berkelanjutan.

Pertama, kerangka ini merujuk pada Teori Partisipasi Publik Arnstein (1969) yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki tingkatan, dimulai dari partisipasi yang bersifat manipulatif, simbolik, hingga partisipasi substantif yang memberikan kendali kepada warga. Dalam konteks masyarakat binaan YASBI, partisipasi warga selama ini cenderung berada pada tingkat tokenisme sekadar hadir atau diundang tanpa memiliki ruang deliberatif. Oleh karena itu, PKM ini diarahkan untuk mendorong warga naik menuju tingkat *meaningful participation* melalui edukasi hukum dan penguatan kepercayaan diri.

Kedua, kerangka berpijak pada Teori Pemberdayaan Paulo Freire (1970) serta Mardikanto (2012) yang menekankan pentingnya pembentukan *kesadaran kritis* (critical consciousness). Pemberdayaan tidak dimaknai sebagai proses pemberian bantuan, tetapi sebagai proses dialogis yang memungkinkan masyarakat memahami strukturalisasi masalah dan menemukan solusi yang relevan dengan kebutuhan mereka sendiri. Pendekatan ini menjadi relevan bagi komunitas urban marginal seperti YASBI, yang membutuhkan penguatan kapasitas internal agar mampu memengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat kelurahan.

Ketiga, intervensi PKM didasarkan pada prinsip Demokrasi Deliberatif (Habermas, 1989) yang menekankan pentingnya ruang publik yang egaliter dan komunikatif. Dalam model deliberatif, diskusi menjadi sarana untuk mencapai pemahaman bersama dan memastikan kebijakan publik lahir dari pertukaran gagasan yang rasional. Karena warga binaan belum memiliki pengalaman berdialog secara formal dengan pemerintah kelurahan, maka PKM ini dirancang untuk membuka *public sphere* yang inklusif melalui forum komunikasi dan dialog interaktif. Ketiga landasan teori tersebut kemudian disusun menjadi satu kerangka kerja operasional yang memandu pelaksanaan PKM secara sistematis dan terukur.

2. Realisasi Pemecahan Masalah

Berikut realisasi dalam pemecahan masalah yang dilakukan pada warga binaan YASBI di Kelurahan Rawa Buntu. Realisasi pemecahan masalah dilakukan melalui tiga strategi utama yang dirancang berdasarkan teori partisipasi publik, pemberdayaan komunitas, dan demokrasi deliberatif. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara partisipatif, interaktif, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas warga binaan YASBI di Kelurahan Rawa Buntu. Adapun realisasi pemecahan masalah adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Literasi Hukum dan Demokrasi

Kegiatan ini direalisasikan melalui serangkaian lokakarya literasi hukum dan demokrasi yang membahas hak-hak konstitusional warga negara, mekanisme kebijakan publik di tingkat kelurahan, serta prosedur penyampaian aspirasi. Materi disampaikan menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus. Peserta dilatih untuk mengenali isu hukum di lingkungannya, memahami struktur pemerintahan lokal, dan menguasai teknik penyampaian aspirasi yang efektif.

Selain itu, dilakukan simulasi forum publik dengan skenario musyawarah kelurahan. Dalam simulasi ini, warga berlatih mengidentifikasi masalah, merumuskan usulan program, dan menyampaikan pendapat secara argumentatif. Hasilnya, warga menjadi lebih percaya diri, memahami hak partisipatifnya, dan mulai melihat keterlibatan publik sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

b. Penguatan Ruang Dialog Publik

Untuk mengatasi terbatasnya ruang dialog antara warga dan pemerintah, PKM merealisasikan kegiatan berupa Forum Komunikasi Warga yang mempertemukan komunitas YASBI dengan perangkat Kelurahan Rawa Buntu. Forum ini menjadi medium bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan mendiskusikan isu-isu publik secara terbuka.

Kegiatan ini dirancang mengikuti prinsip demokrasi deliberatif, di mana dialog difasilitasi secara setara, terbuka, dan komunikatif. Pemerintah kelurahan merespons pertanyaan warga, memberikan klarifikasi kebijakan, serta memberikan ruang bagi warga untuk memaparkan prioritas kebutuhan lingkungan. Forum ini menghasilkan Agenda Aspirasi Masyarakat, yaitu daftar isu yang disusun bersama untuk menjadi acuan komunikasi lanjutan antara warga dan pemerintah kelurahan. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membangun budaya dialog publik yang berkelanjutan di komunitas YASBI.

c. Peningkatan Kapasitas Organisasi Komunitas (YASBI)

Solusi terakhir direalisasikan melalui pelatihan dan pendampingan bagi pengurus dan relawan YASBI. Kegiatan mencakup Pelatihan Manajemen Organisasi Komunitas Untuk memperkuat struktur kelembagaan, sistem pelaporan,

dan mekanisme internal organisasi. Sesi Konsultasi Strategi Advokasi Lokal Untuk membantu YASBI menyusun strategi intervensi sosial yang lebih terarah, efektif, dan berdampak. Kemudian Pendampingan Penyusunan Program Jangka Panjang Agar YASBI memiliki roadmap kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, bukan hanya kegiatan karitatif sesaat.

Penguatan kapasitas organisasi ini sangat penting agar dampak PKM dapat berlanjut setelah kegiatan selesai. Dengan meningkatnya kemampuan manajerial dan advokatif, YASBI dapat menjadi pusat belajar komunitas yang mandiri dan berkelanjutan.

3. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dalam program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini adalah masyarakat binaan Yayasan Ashaabul Ardhi Sahabat Bumi (YASBI) yang berdomisili di Kampung Dadap, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Komunitas ini terdiri dari kurang lebih 50 orang. Komunitas ini berada pada kawasan urban marginal yang berkembang pesat, namun sebagian warganya belum sepenuhnya tersentuh oleh program pemberdayaan hukum dan demokrasi. Mayoritas masyarakat bekerja di sektor informal seperti buruh bangunan, pedagang kecil, pekerja lepas, hingga ibu rumah tangga yang memiliki mobilitas terbatas. Kondisi tersebut membuat mereka lebih rentan terhadap kesenjangan informasi dan minimnya akses terhadap layanan publik yang optimal. Adapun Karakteristik Sosial dan Kebutuhan Khalayak kami susun dengan sedemikian rupa.

Pertama, khalayak sasaran memiliki keterbatasan dalam literasi hukum dan demokrasi. Sebagian besar warga belum memahami sepenuhnya hak-hak konstitusional yang melekat pada diri mereka sebagai warga negara, termasuk mekanisme penyampaian aspirasi, alur kebijakan publik, serta fungsi pengawasan sosial di tingkat kelurahan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi substantif dalam proses pemerintahan lokal. Mereka cenderung hanya hadir ketika diundang secara formal, tanpa mampu memberikan kontribusi opini secara kritis maupun deliberatif.

Kedua, kelompok ini belum memiliki ruang dialog yang memadai dengan perangkat kelurahan. Warga merasa belum punya wadah yang aman dan setara untuk menyampaikan keluhan, kebutuhan, maupun kritik terhadap program pemerintah. Minimnya kanal komunikasi ini menyebabkan aspirasi publik sering tidak tersalurkan secara efektif. PKM ini memandang penting untuk menghadirkan ruang komunikasi partisipatif yang bersifat dialogis dan tidak hierarkis.

Ketiga, khalayak sasaran memiliki potensi sosial dan solidaritas komunitas yang cukup kuat, terutama karena keberadaan YASBI sebagai organisasi lokal yang bergerak di bidang kemanusiaan, lingkungan, dan pendidikan sosial. Namun kapasitas organisatoris YASBI masih memerlukan penguatan, baik dalam aspek manajemen komunitas, strategi advokasi, maupun perencanaan program jangka

panjang. Dengan penguatan kapasitas ini, YASBI diharapkan mampu menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan.

Keempat, warga Kampung Dadap termasuk kelompok urban marginal yang rentan terhadap pengabaian kebijakan publik. Mereka menghadapi keterbatasan akses informasi, ketidakmerataan layanan administrasi, dan minimnya partisipasi digital, seperti penggunaan kanal SP4N-LAPOR atau forum musrenbang. Kondisi ini semakin menegaskan perlunya intervensi PKM yang berfokus pada peningkatan literasi, penyediaan ruang dialog, dan penguatan kapasitas komunitas.

4. Tujuan Penguatan Khalayak Sasaran

Program PKM ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat binaan YASBI agar memiliki pemahaman hukum dan demokrasi yang lebih baik, sehingga mampu mengenali dan memperjuangkan hak-haknya. Berani dan terbiasa menyampaikan pendapat secara sopan, kritis, dan konstruktif melalui forum publik. Menjadi bagian dari komunitas warga yang aktif mengawasi dan mengawal kebijakan publik di tingkat lokal. Mampu membangun sinergi dengan pemerintah kelurahan secara kolaboratif dan dialogis. Mendorong YASBI menjadi lembaga pemberdayaan yang kuat, visioner, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, khalayak sasaran dalam PKM ini tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai aktor perubahan yang berpotensi menjadi motor penggerak demokrasi lokal. Melalui pendekatan literasi hukum, dialog publik, dan penguatan organisasi komunitas, diharapkan tercipta warga yang lebih kritis, berdaya, serta mampu menjadi subjek pembangunan di tingkat akar rumput.

5. Tempat dan Waktu

Adapun tempat dan waktu Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat PKM ini dilaksanakan selama 3 hari yakni pada :

Hari	: Kamis – Sabtu
Tanggal	: 6 - 8 November 2025
Tempat	: Yayasan Ashaabul Ardhi Sahabat Bumi (YASBI)
Waktu	: 09.00 wib s/d Selesai

6. Metode Kegiatan

Langkah nyata Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul “*Penguatan Partisipasi Publik dalam Kerangka Demokrasi melalui Pemberdayaan Masyarakat pada Yayasan Ashaabul Ardhi Sahabat Bumi (YASBI)*” dilaksanakan selama tiga hari, yaitu Kamis - Sabtu, 6 - 8 November 2025, di lingkungan Yayasan YASBI, Rawa Buntu, Serpong. Metode pelaksanaan dirancang secara partisipatif, edukatif, dan aplikatif, yang menekankan keterlibatan aktif pengurus yayasan, relawan, guru, dan masyarakat dampingan sejak tahap persiapan hingga pasca-kegiatan.

Tema kegiatan PKM ini ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat yang bersifat aktif (*bottom-up*). Dalam tahap awal, tim pengusul melakukan observasi lapangan dan wawancara terbuka dengan pengurus YASBI serta tokoh warga setempat untuk memetakan permasalahan sosial yang paling mendesak. Dari proses ini terungkap adanya kesenjangan antara tingkat literasi hukum warga dengan kemampuan mereka berpartisipasi dalam forum-forum kebijakan kelurahan. Melalui *Focus Group Discussion* (FGD) awal, masyarakat secara langsung mengusulkan pentingnya kegiatan yang mampu memperkuat kepekaan sosial dan kontrol warga terhadap kebijakan lokal. Dengan demikian, pemilihan tema ini bukan semata gagasan akademik dosen, melainkan hasil refleksi bersama antara masyarakat dan tim pengabdian, sehingga kegiatan yang dilaksanakan benar-benar relevan dengan kebutuhan lapangan.

a. Tahapan Persiapan.

Pada tahap awal, dilakukan koordinasi internal antara tim pengusul PKM, pengurus YASBI, serta tokoh masyarakat lokal. Kegiatan meliputi observasi lapangan dan pemetaan sosial untuk memperbarui data penerima manfaat, latar sosial-ekonomi warga, serta pola interaksi antara yayasan dan masyarakat sekitar. *Focus Group Discussion* (FGD) awal guna memverifikasi permasalahan prioritas yang telah diidentifikasi, seperti rendahnya literasi partisipasi publik, lemahnya komunikasi sosial, dan belum adanya forum deliberatif komunitas.

Penyusunan jadwal rinci kegiatan tiga hari, pembagian peran narasumber, fasilitator, dan koordinator logistik. Pembuatan materi pelatihan dan modul kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik peserta, menggunakan bahasa komunikatif dan berbasis pengalaman lapangan. Tahap ini berfungsi memastikan kegiatan benar-benar relevan dengan kebutuhan mitra, serta menjadi pijakan konseptual bagi kegiatan berikutnya.

Selain itu, tim pengusul menggunakan hasil pemetaan sosial dan wawancara mendalam sebagai dasar penyusunan materi pelatihan, sehingga topik yang diangkat bukan sekadar transfer ilmu, tetapi jawaban atas persoalan riil yang dihadapi warga. Pendekatan ini memastikan kegiatan PKM tidak bersifat top-down, melainkan tumbuh dari partisipasi aktif masyarakat sendiri.

b. Peningkatan Kapasitas dan Literasi Partisipasi Publik yang dilaksanakan pada hari Kamis, 6 November 2025

Kegiatan hari pertama difokuskan pada transfer pengetahuan dan kesadaran kewargaan, dengan tujuan Membangun Kesadaran Partisipasi dalam Demokrasi Lokal. Langkah-langkah pelaksanaan meliputi:

- 1) Pembukaan Program PKM dan Sosialisasi Tujuan Kegiatan. Acara dibuka oleh pengurus YASBI dan perwakilan tim dosen, dihadiri masyarakat, relawan, dan mahasiswa.
- 2) Workshop Literasi Demokrasi dan Kewargaan Aktif. Peserta dikenalkan pada

prinsip dasar partisipasi publik dalam UUD 1945 dan UU No. 25 Tahun 2004. Materi disampaikan dengan metode *interactive learning*, diskusi kelompok, dan studi kasus sederhana dari pengalaman warga.

- 3) Pelatihan Kepemimpinan Komunitas. Peserta dilatih mengidentifikasi isu sosial dan menyusun rencana aksi komunitas berbasis partisipasi. Pelatihan dipandu fasilitator dengan metode simulatif (*role play*) dan refleksi.
- 4) Forum Warga Mini. Simulasi musyawarah sederhana untuk melatih warga berdialog, menyampaikan pendapat, dan membuat kesepakatan bersama.

Luaran hari pertama berupa pemahaman peserta dalam memahami literasi demokrasi, modul pelatihan kewargaan, serta terbentuknya tim inisiator forum warga YASBI.

- c. Penguatan Komunikasi Sosial dan Digitalisasi Partisipasi yang dilaksanakan pada hari Jumat, 7 November 2025

Kegiatan hari kedua ini diarahkan pada pembentukan sistem komunikasi yang inklusif dan digital untuk mendukung partisipasi publik secara berkelanjutan. Langkah-langkah kegiatan meliputi:

- 1) Pelatihan Literasi Digital dan Media Sosial Positif. Dosen dan mahasiswa memperkenalkan cara penggunaan teknologi digital dalam memperkuat jejaring sosial komunitas.
- 2) Pengenalan dan Simulasi Portal Komunitas YASBI. Peserta dilatih mengakses, mengunggah, dan mengelola konten kegiatan sosial, ide warga, serta laporan transparansi yayasan.
- 3) Pembuatan Sistem Absensi dan Dokumentasi Partisipatif Berbasis Web. Sistem ini mencatat kehadiran peserta dan ide masyarakat secara otomatis untuk mendukung akuntabilitas kegiatan.
- 4) Diskusi Terbuka mengenalkan Teknologi sebagai Alat Demokrasi Sosial. Peserta merefleksikan peran teknologi dalam memperluas ruang partisipasi warga di era digital.

Luaran hari kedua mencakup partisipasi komunitas aktif dalam penggunaan media sosial guna mempublish secara digital kegiatan sosial, serta peningkatan kapasitas digital masyarakat YASBI.

- d. Pembentukan Forum Demokrasi Komunitas yang diselenggarakan di hari Sabtu, 8 November 2025

Hari terakhir diarahkan pada pembentukan struktur kelembagaan partisipatif dan dokumen pendukung demokrasi lokal. Adapun tahapan kegiatan yakni:

- 1) Pelatihan Manajemen Partisipatif dan Tata Kelola Demokratis. Peserta mempelajari prinsip deliberasi, transparansi, dan tanggung jawab sosial

lembaga komunitas.

- 2) Penyusunan Piagam Partisipasi Komunitas. Dokumen etis ini berisi nilai, prinsip, dan mekanisme partisipatif yang disepakati bersama antara pengurus, guru, relawan, dan masyarakat dampingan.
- 3) Simulasi Musyawarah Rencana Aksi Sosial. Peserta berlatih menyusun agenda kegiatan sosial tahunan berbasis kebutuhan warga.
- 4) Pembentukan Forum Demokrasi Komunitas YASBI. Forum ini menjadi wadah permanen bagi komunikasi dua arah antara yayasan dan masyarakat, dilengkapi struktur kepengurusan sederhana.

Luaran hari ketiga adalah Forum Demokrasi Komunitas YASBI terbentuk, Piagam Partisipasi Komunitas ditandatangani, dan dokumen Musyawarah Rencana Aksi Sosial Tahunan disusun sebagai hasil deliberasi bersama.

Partisipasi mitra dilakukan secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pengurus YASBI berperan sebagai koordinator lapangan dan fasilitator lokal, relawan berperan sebagai panitia pelaksana teknis, sementara masyarakat dampingan menjadi peserta inti sekaligus kontributor ide dalam setiap kegiatan. Pendekatan partisipatoris ini dirancang untuk menumbuhkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap hasil kegiatan dan memperkuat kapasitas kelembagaan sosial yayasan.

e. Evaluasi dan Keberlanjutan Program

Evaluasi dilakukan melalui dua bentuk:

- Evaluasi Proses, yakni penilaian harian terhadap keaktifan peserta, ketercapaian jadwal, dan kesesuaian materi dengan kebutuhan mitra.
- Evaluasi Hasil, berupa pengukuran perubahan pengetahuan dan keterampilan peserta melalui pre-test dan post-test sederhana, serta dokumentasi laporan kegiatan berbasis digital.

Keberlanjutan program dijamin melalui pembentukan Tim Pengelola Partisipasi Publik YASBI yang akan melanjutkan seluruh aktivitas pasca-PKM, termasuk pembaruan portal komunitas dan pelaksanaan forum warga rutin. Tim dosen dan mahasiswa akan tetap mendampingi secara periodik dalam bentuk klinik digital dan monitoring sosial.

f. Keterkaitan dengan Hasil Riset Tim Pengusul

Program ini mengacu pada hasil riset tim pengusul tentang Penguatan Partisipasi Publik dalam Kerangka Demokrasi melalui Pemberdayaan Masyarakat, yang menunjukkan bahwa keberhasilan partisipasi sangat bergantung pada literasi

warga, sistem komunikasi yang terbuka, dan struktur kelembagaan yang inklusif. Hasil riset ini menjadi dasar konseptual penyusunan modul, desain forum warga, dan pengembangan portal digital sebagai sarana demokrasi komunitas.

Dengan metode pelaksanaan yang sistematis selama tiga hari ini, diharapkan kegiatan PKM tidak hanya memberikan dampak sesaat, tetapi juga meninggalkan jejak kelembagaan dan kultural yang memperkuat peran Yayasan Ashaabul Ardhi Sahabat Bumi (YASBI) sebagai pionir demokrasi partisipatif di tingkat komunitas urban. Program ini berfungsi sebagai model pemberdayaan sosial yang dapat direplikasi oleh yayasan serupa di wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan dalam tiga hari melalui tiga rangkaian utama, Lokakarya Literasi Hukum dan Demokrasi, Dialog Partisipatif antara warga dan perangkat kelurahan, serta pendampingan penguatan kapasitas komunitas YASBI. Seluruh kegiatan bertempat di Kampung Dadap, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, dengan total peserta sebanyak ± 50 warga, terdiri dari buruh bangunan, pedagang kecil, pekerja informal, ibu rumah tangga, serta pengurus YASBI.

Kegiatan lokakarya memberikan pemahaman mendasar mengenai hak-hak konstitusional warga negara, konsep pelayanan publik, mekanisme penyampaian aspirasi, serta prosedur pengawasan kebijakan. Dari evaluasi awal dan akhir (pre-test dan post-test sederhana), terdapat peningkatan pemahaman warga mengenai Hak memperoleh pelayanan publik yang baik, Hak menyampaikan pendapat di muka umum, Cara menyampaikan aspirasi melalui kanal formal (SP4N LAPOR, RT/RW, kelurahan).

Warga juga melakukan *simulasi dialog* mengenai isu kebersihan lingkungan dan akses air bersih, sehingga mereka dapat mempraktikkan cara menyusun aspirasi secara terstruktur dan komunikatif. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman sangat efektif dalam membangkitkan kesadaran kritis (Freirean approach). Selain itu Sesi dialog partisipatif mempertemukan warga dengan perwakilan kelurahan. Dalam proses tersebut, warga untuk pertama kalinya secara langsung menyampaikan tiga isu prioritas mengenai minimnya penerangan jalan di beberapa gang kecil. Kebutuhan dukungan sarana kebersihan lingkungan. Dan yang paling krusial mengenai tidak meratanya informasi program bantuan sosial di tingkat RT.

Dialog berlangsung produktif, dengan perangkat kelurahan memberikan klarifikasi, menjelaskan alur pengajuan program, serta menanggapi keluhan warga. Dari observasi, terlihat bahwa warga mulai berani berbicara di forum publik.

komunikasi dua arah tercipta dengan lebih sistematis. perangkat kelurahan lebih memahami kebutuhan spesifik warga Kampung Dadap.

Kegiatan ini berhasil membuka ruang deliberatif, sesuai konsep demokrasi dialogis Habermas, di mana warga menjadi aktor aktif dalam pertukaran gagasan dan penyampaian aspirasi publik. Intervensi PKM tidak hanya menasar warga, tetapi juga pengurus YASBI sebagai mitra komunitas agar mampu melanjutkan pembinaan secara mandiri. Pendampingan Pelatihan manajemen komunitas, penyusunan rencana kegiatan jangka pendek (3 bulan) dan jangka menengah (1 tahun), Hasilnya YASBI menyusun Agenda Program Komunitas 2025, berisi kegiatan kebersihan lingkungan, pelatihan advokasi sederhana, dan program literasi keluarga.

Memgetahui adanya lembaga bantuan hukum di universitas pamulang sebagai mitra dalam menagadvokasi jika ada permasalahan hukum, Tersusun struktur organisasi internal yang lebih jelas, termasuk penanggung jawab program advokasi warga. YASBI kini memiliki draft dokumen aspirasi, sehingga siap berkolaborasi dengan kelurahan. Progres ini menunjukkan bahwa pemberdayaan komunitas telah bergerak dari sekadar partisipasi simbolik menuju partisipasi substantif (Arnstein).

2. Pembahasan Hasil PKM

Hasil kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa pendekatan integratif literasi hukum, ruang deliberatif, dan penguatan organisasi efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat urban marginal. Intervensi yang dilakukan sejalan dengan teori: Arnstein (1969) yaitu masyarakat bergerak dari tokenisme (kehadiran tanpa suara) menuju konsultasi dan kemitraan awal. Kemudian Freire (1970) dimana kesadaran kritis warga tumbuh melalui dialog dan simulasi. Dan pandangan Habermas (1989) mengenai Ruang publik deliberatif hadir melalui forum warga - kelurahan.

Dari sisi praktik, kegiatan yang hanya berlangsung satu hari tetap mampu menghasilkan perubahan pengetahuan dan membuka kebiasaan baru, namun untuk keberlanjutan diperlukan:

- a. pendampingan lanjutan YASBI,
- b. penguatan komunikasi warga, serta
- c. kolaborasi rutin dengan kelurahan.

PKM ini menjadi bukti bahwa pemberdayaan masyarakat tidak harus dimulai dari intervensi besar; tetapi dari ruang dialog kecil yang rutin dan terarah.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada peningkatan literasi hukum, penguatan partisipasi publik, dan pengembangan

kapasitas komunitas di lingkungan Yayasan Ashaabul Ardhi Sahabat Bumi (YASBI) telah memberikan dampak positif bagi masyarakat binaan di Kampung Dadap, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong. Berdasarkan rangkaian kegiatan lokakarya, forum dialog, dan pendampingan komunitas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peningkatan Literasi Hukum dan Demokrasi.

PKM berhasil meningkatkan pemahaman warga mengenai hak-hak konstitusional, mekanisme penyampaian aspirasi, serta prosedur partisipasi dalam kebijakan publik. Peserta mampu mengenali isu-isu hukum yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, serta menunjukkan peningkatan keberanian dalam menyuarakan pendapat pada forum publik.

2. Pembentukan Ruang Dialog Publik yang Lebih Setara.

Kegiatan dialog antara warga, pengurus YASBI, dan perangkat kelurahan telah membuka ruang komunikasi yang sebelumnya minim atau tidak terfasilitasi. Forum ini memungkinkan pertukaran gagasan yang lebih terbuka dan mendorong aparat kelurahan untuk lebih responsif terhadap persoalan warga. Interaksi ini menjadi langkah awal terbentuknya budaya deliberasi di tingkat lokal.

3. Penguatan Kapasitas Organisasi YASBI.

Melalui pelatihan manajemen komunitas dan penyusunan strategi advokasi, YASBI menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengelola program pemberdayaan secara lebih sistematis. Organisasi mitra kini memiliki rencana tindak lanjut yang lebih terarah untuk mengembangkan program lanjutan berbasis literasi hukum dan advokasi sosial.

4. Terbentuknya Kesadaran Kritis dan Modal Sosial Komunitas.

PKM berhasil memantik kesadaran kritis warga mengenai pentingnya peran mereka sebagai subjek pembangunan. Melalui pendekatan pemberdayaan, masyarakat tidak lagi memosisikan diri sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai aktor yang memiliki suara, kepentingan, dan kemampuan untuk memengaruhi keputusan publik.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat ekosistem demokrasi lokal, khususnya di wilayah urban marginal yang sering kali luput dari ruang partisipasi dan akses informasi publik.

Berdasarkan hasil pelaksanaan PKM dan dinamika yang ditemukan di lapangan, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk keberlanjutan program dan pengembangan kegiatan di masa mendatang:

1. Keberlanjutan Program Literasi Hukum.

Perlu dilakukan kegiatan lanjutan secara periodik untuk memperdalam materi hukum dan demokrasi, termasuk pelatihan mengenai layanan publik, akses bantuan hukum, dan penggunaan kanal digital aspirasi seperti SP4N-LAPOR. Kegiatan lanjutan ini penting untuk menjaga keberlanjutan daya kritis warga.

2. Penguatan Forum Komunikasi Warga.

Disarankan agar YASBI dan kelurahan menginisiasi pembentukan *Forum Warga Rawa Buntu* sebagai wadah dialog rutin antara pemerintah dan masyarakat. Forum ini dapat menjadi jembatan aspirasi dan sarana monitoring terhadap pelaksanaan program publik di tingkat kelurahan.

3. Peningkatan Kapasitas Organisasi YASBI.

YASBI perlu memperkuat struktur kelembagaan dan membangun jejaring dengan lembaga lain, seperti perguruan tinggi, NGO, dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini akan memperluas jangkauan program pemberdayaan serta meningkatkan legitimasi organisasi di mata masyarakat.

4. Pengembangan Program Pemberdayaan Berbasis Isu Tematik.

Saran berikutnya adalah mengembangkan PKM lanjutan yang menyentuh isu-isu spesifik seperti lingkungan, kesehatan keluarga, ekonomi produktif, atau mitigasi risiko sosial. Pendekatan tematik akan memberi dampak lebih mendalam dan relevan sesuai kebutuhan warga.

5. Dokumentasi dan Publikasi Hasil PKM.

Untuk memperkuat visibilitas dan dampak akademik program, hasil PKM disarankan dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah, prosiding, atau diseminasi lokal. Publikasi ini penting untuk membangun rekam jejak program dan memperluas praktik baik di komunitas lain.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan kegiatan PKM tidak hanya berhenti pada tataran pelaksanaan satu kali, tetapi mampu menjadi program berkelanjutan yang terus mendorong pemberdayaan masyarakat, penguatan literasi hukum, dan peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryatmoko. (2011). *Etika Politik dan Kekuasaan: Membangun Masyarakat Demokratis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Pembangunan Masyarakat: Teori, Kebijakan, dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Sutoro Eko. (2014). *Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: FPPD (Forum Pengembangan Partisipasi Publik).
- Wrihatnolo, Randy R., & Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Adisasmita, Rahardjo. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahyudi Kumorotomo. (2013). *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bappenas RI. (2019). *Panduan Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Anwar Arifin. (2005). *Demokrasi dalam Komunikasi Politik Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryanto, Joko. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Kebijakan Publik dan Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pratikno & Abdul Gaffar Karim. (2005). *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Politik di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanif Nurcholis. (2011). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2020). *Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Rahayu, Sri. (2021). "Pemberdayaan Masyarakat sebagai Strategi Pembangunan Partisipatif di Era Desentralisasi." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 25 No. 2, Universitas Gadjah Mada.
- Suryono, Agus & Haryanto, Joko. (2019). "Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kemandirian Sosial Ekonomi." *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik (MKP)*, Vol. 32 No. 1, Universitas Airlangga.
- Fitriani, Dina. (2020). "Partisipasi Publik dalam Pembentukan Kebijakan Daerah: Analisis dari Perspektif Good Governance." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol. 7 No. 3, Universitas Padjadjaran.
- Nuridin, M. (2018). "Demokrasi Partisipatoris dan Tantangan Penguatan Civil Society di Indonesia." *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 20 No. 2, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Pratiwi, Ratna. (2022). "Inovasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*, Vol. 6 No. 1, Universitas Indonesia.

- Arifin, Zainal. (2021). *Partisipasi Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Antara Idealitas dan Realitas*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 9(2), 145–160.
- Rahayu, Siti. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat dan Demokrasi Partisipatif di Era Desentralisasi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(3), 412–428.
- Sari, N. D., & Pramono, E. (2022). *Literasi Hukum dan Partisipasi Warga dalam Proses Pengambilan Keputusan Publik di Tingkat Lokal*. Jurnal Civic Education, 6(1), 33–47.
- Kurniawati, L., & Darmawan, R. (2023). *Penguatan Kontrol Sosial Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Forum Warga*. Jurnal Demokrasi dan Partisipasi, 8(1), 55–70.
- Yusuf, M. A. (2024). *Digital Citizenship dan Partisipasi Demokrasi Lokal di Era Media Sosial*. Jurnal Komunikasi dan Transformasi Sosial, 12(2), 98–115.
- Wibisono, Aditya. (2021). *Pendidikan Kewargaan sebagai Instrumen Penguatan Demokrasi Substantif di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Kewarganegaraan, 5(2), 201–215.
- Nurfadilah, H., & Syafruddin, I. (2023). *Evaluasi Program Pengabdian Masyarakat dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Warga*. Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Hukum, 4(1), 72–88.
- Hartono, B., & Fitriani, R. (2020). *Model Partisipasi Publik dalam Pengawasan Pemerintahan Desa*. Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, 9(3), 245–260.
- Sumantri, D. (2024). *Pemberdayaan Sosial sebagai Instrumen Demokrasi Lokal: Kajian terhadap Partisipasi Warga di Tangerang Selatan*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 11(2), 121–136.
- Setiawan, A. R. (2022). *Collaborative Governance dan Tantangan Partisipasi Publik di Pemerintahan Lokal*. Jurnal Politik dan Pemerintahan, 14(4), 301–319.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Laporan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Pusat Litbang Otonomi Daerah.
- Bappenas. (2022). *Panduan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Direktorat Pembangunan Daerah.
- Kompas.id. (2024). *Literasi Hukum dan Demokrasi Lokal: Tantangan Partisipasi di Kota Tangerang Selatan*. Diakses dari <https://kompas.id/literasi-hukum-lokal>